

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja Pelaksanaan Keuangan Daerah yang realisasinya diwujudkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas perkiraan pendapatan daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, didefinisikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Komponen pendapatan daerah terdiri atas :
 - a. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
 - b. Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
2. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Komponen Belanja Daerah terdiri atas :
 - a. Belanja Tidak Langsung pada umumnya berupa belanja wajib dan mengikat yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan

- b. Belanja Langsung adalah belanja yang dalam pengalokasian didasarkan atas Program dan Kegiatan yang ditujukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Komposisi belanja langsung terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal
3. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Komponen pembiayaan sebagai berikut :
 - a. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan

3.1.1.1 Realisasi Pelaksanaan APBD

Perkembangan APBD Provinsi Banten Tahun 2012-2016 menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik. **Rata – rata pertumbuhan pendapatan daerah** berada pada kisaran 12,58 persen, pendapatan daerah pada tahun 2012 sebesar Rp 5,41 triliun terus bergerak naik hingga pada tahun 2016 menjadi Rp 8,65 triliun. Pertumbuhan tersebut memberikan gambaran yang sangat baik terhadap peningkatan pendapatan daerah. Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebesar 12,9 persen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2012 masih sebesar Rp 3,30 triliun dan menjadi Rp 5,46 triliun pada tahun 2016.

Rata-rata pertumbuhan Dana Perimbangan pada posisi 56 persen. Realisasi Dana Perimbangan secara berurutan sebesar tahun 2012 sebesar Rp 1,01 triliun, tahun 2013 sebesar Rp 1,12 triliun, Tahun 2014 sebesar Rp 1,15, tahun 2016 sebesar Rp 0,97 triliun, dan tahun 2016 sebesar Rp 3,18 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penurunan pendapatan dana perimbangan pada tahun 2015 dan selanjutnya meningkat tajam pada tahun 2016. Menurunnya pendapatan

dana perimbangan disebabkan oleh menurunnya pendapatan dana perimbangan yang bersumber dari dana bagi hasil pajak (DBH Pajak) dan dana alokasi umum (DAU) seiring dengan menurunnya capaian penerimaan negara di sektor perpajakan. Selanjutnya pada Tahun 2016 pendapatan Dana Perimbangan meningkat tajam hal tersebut dipengaruhi oleh adanya pengalihan pos pendapatan belanja BOS yang pada tahun 2012-2015 berada pada kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dialihkan menjadi kelompok Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Kelompok Pendapatan Dana Perimbangan yang posisinya menyumbang rata rata pertumbuhan Dana Alokasi Khusus hingga mencapai 2.947,60 persen. hal ini juga sekaligus berdampak pada turunnya **rata-rata pertumbuhan lain-lain pendapatan daerah yang sah** menjadi minus 15,54 persen.

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah yaitu dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Banten tergolong tinggi. Pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi Banten memiliki rasio kemandirian keuangan daerah kategori tinggi yaitu sebesar 171 persen.

Kondisi yang lebih menggembirakan terhadap perkembangan pendapatan daerah di Provinsi Banten dimana Komposisi Pendapatan daerah selama kurun waktu 2012-2016 didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak daerah yang berasal pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Rokok yang pada tahun 2016 secara kumulasi mencapai 63 persen dari Pendapatan Daerah. Komposisi dana perimbangan meningkat tajam pada tahun 2016 hingga mencapai 36 persen dari pendapatan daerah. hal tersebut merupakan dampak dengan adanya Dana BOS yang dikelompokkan dalam DAK Non Fisik. Selanjutnya untuk Dana alokasi umum sebesar 7,63 persen dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar 5,56 persen. Selanjutnya lain-lain pendapatan daerah yang sah berada komposisi yang sangat kecil yaitu sekitar 0,9 persen.

Seiring dengan meningkatnya pendapatan daerah, belanja daerah selama kurun waktu 2012-2016 juga mengalami peningkatan yang cukup

signifikan dengan rata -rata pertumbuhan sebesar 14,37 persen. Realisasi Belanja Daerah pada tahun 2012 sebesar Rp 5,31 triliun dan menjadi Rp8,92 triliun pada tahun 2016. Peningkatan Belanja Daerah tersebut ditopang oleh kenaikan Belanja tidak langsung dan Belanja Langsung. Komponen Belanja tidak langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten Kota, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota, Partai Politik dan Pemerintahan Desa, serta Belanja Tidak Terduga. Pertumbuhan Rata-rata Belanja Tidak Langsung sebesar 15,68 persen dengan rata rata pertumbuhan sebagai berikut :

1. Realisasi Belanja Pegawai memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 11,49 persen. Peningkatan realisasi belanja pegawai terjadi seiring dengan adanya kenaikan gaji dan tunjangan PNSD serta adanya penambahan penghasilan PNSD sehubungan dengan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penambahan tunjangan keluarga, serta adanya penambahan Jumlah PNSD.
2. Realisasi Belanja Hibah memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 20,89 persen yang didalamnya secara signifikan lebih dipengaruhi oleh belanja bantuan operasional sekolah pendidikan dasar dan pendidikan menengah selain itu juga terdapat belanja hibah kepada lembaga pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dalam rangka mendukung capaian sasaran pembangunan Provinsi Banten.
3. Realisasi Belanja Bantuan Sosial memiliki rata pertumbuhan sebesar 46,06 persen. Tingginya rata-rata pertumbuhan belanja bantuan sosial pada APBD Provinsi Banten Kurun Waktu 2012-2016 ditujukan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dalam bentuk crisis action program yaitu bantuan sosial untuk keluarga sangat miskin (JAMSOSRATU), bantuan sosial kecacatan, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pemenuhan kebutuhan dasar anak, dan KUBE.
4. Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 15,46 persen. Kenaikan tersebut sebagai kosekuensi dengan terus meningkatnya realisasi pendapatan pajak daerah khususnya komponen dalam pendapatan asli daerah.
5. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan desa sebesar 27,54 persen sebagai upaya pemerintah Provinsi Banten dalam rangka membantu capaian pembangunan

Provinsi Banten yang kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

6. Realisasi Belanja Tidak Terduga tidak ada pertumbuhan. Hal tersebut disebabkan karakteristik Belanja Tidak terduga yang realisasinya hanya dapat digunakan untuk mendanai kegiatan pendanaan kebencanaan serta pembayaran atas pengembalian pendapatan tahun-tahun sebelumnya.

Realisasi Belanja Langsung memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 13,44 persen. Belanja Langsung adalah kelompok Belanja yang alokasi di dalamnya ditujukan untuk melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan serta memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Komponen belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja Modal. Rata-rata pertumbuhan belanja pegawai sebesar minus 0,88 persen menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten semakin efisien dalam rangka penyelenggaraan program/kegiatan pembangunan. Kemudian rata-rata pertumbuhan belanja barang dan jasa sebesar 15,62 persen dan Belanja Modal sebesar 18,56 persen. Berdasarkan Komposisi Pertumbuhan rata-rata Belanja Langsung juga menggambarkan hal yang positif dimana pertumbuhan rata-rata tertinggi terdapat pada kelompok belanja modal dan diikuti dengan Belanja Barang dan jasa. Belanja barang dan Jasa ditujukan untuk membiayai program atau kegiatan yang bersifat operasional sedangkan belanja modal lebih ditujukan untuk penyediaan barang modal berupa tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan dan jembatan, serta asset lainnya yang menambah nilai bersih kekayaan pemerintah daerah.

Pembiayaan Daerah yang komponennya terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran pembiayaan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 157 persen. Namun demikian nilai rata rata pertumbuhan tersebut kurang dapat memberikan gambaran karena realisasinya yang sangat berfluktuasi. Komponen pembiayaan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi Penerimaan pembiayaan secara dominan hanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA).

Realisasi dimaksud sangat bergantung pada capaian program kegiatan tahun sebelumnya yaitu capaian target pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah, misalnya kinerja Belanja Daerah dalam satu tahun anggaran adalah sebesar 95,00 persen maka dalam kondisi capaian target pendapatan daerah sebesar 100 persen akan menyebabkan SiLPA sebesar 5,00 persen dari Belanja Daerah.

2. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan ditujukan untuk penyertaan modal kepada Badan usaha pemerintah daerah yaitu PT BGD, PT Bank Jabar Banten, BPR/LPK, dan PT JAMKRIDA. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud hanya dapat dilaksanakan dalam hal telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha.

Data perkembangan relaisasi APBD Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.1
Realisasi Pendapatan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012-2016

NO	URAIAN	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN DAERAH	5.413.705.183.626	6.230.229.813.799	7.068.432.912.654	7.328.220.769.427	8.656.395.495.445	12,58
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.395.883.043.919	4.118.551.716.459	4.899.125.741.756	4.972.737.619.281	5.463.156.734.851	12,90
	Pajak Daerah	3.257.728.614.843	3.943.816.591.566	4.624.337.475.308	4.686.574.137.486	5.215.140.686.124	12,73
	Retribusi Daerah	6.418.727.194	13.669.633.828	30.734.862.552	47.693.913.039	72.500.255.191	86,25
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	32.293.948.793	38.331.096.525	42.421.275.504	42.436.400.420	50.083.829.359	11,86
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	99.441.753.089	129.658.194.408	201.632.128.392	196.033.168.336	125.431.964.177	11,78
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.015.105.167.897	1.126.004.171.838	1.159.872.633.122	976.787.585.900	3.185.553.940.739	56,07
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	454.584.589.897	498.321.857.838	418.844.143.122	319.017.534.900	493.494.029.945	6,13
	Dana Bagi Hasil Pajak	451.137.609.766	494.140.096.588	415.270.932.833	313.708.987.325	489.941.663.642	6,32
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumberdaya Alam	3.446.980.131	4.181.761.250	3.573.210.289	5.308.547.575	3.552.366.303	5,56
	Dana Alokasi Umum	530.833.378.000	617.081.101.000	728.490.012.000	640.981.003.000	693.738.579.794	7,63
	Dana Alokasi Khusus	29.687.200.000	10.601.213.000	12.538.478.000	16.789.048.000	1.998.321.331.000	2.947,60
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.002.716.971.810	985.673.925.502	1.009.434.537.776	1.378.817.456.419	7.684.819.855	(15,54)
	Pendapatan Hibah	4.256.098.000	4.670.632.000	5.441.490.000	5.245.680.000	5.479.200.000	6,77
	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	998.428.325.000	979.144.586.000	1.001.583.024.000	1.372.280.428.500	-	(15,66)
	Pendapatan Lainnya	32.548.810	1.858.707.502	2.410.023.776	1.169.455.746	2.205.619.855	22,26
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	5.413.705.183.626	6.230.229.813.799	7.068.432.912.654	7.328.220.769.427	8.656.395.495.445	12,58
2	BELANJA DAERAH						
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.300.647.526.762	3.316.069.656.604	4.013.607.703.615	4.758.963.213.403	5.835.995.713.862	15,68
	Belanja Pegawai	384.981.221.088	423.141.043.569	481.328.441.248	544.637.409.065	594.410.665.016	11,49

NO	URAIAN	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Belanja Bunga	-	-	-			-
	Belanja Subsidi	-	-	-			-
	Belanja Hibah	1.288.347.988.660	1.331.719.638.201	1.244.666.640.856	1.500.205.771.116	2.493.536.667.187	20,89
	Belanja Bantuan Sosial	38.852.100.000	36.185.650.000	86.602.000.000	131.217.500.000	131.544.392.635	46,06
	Belanja Bagi Hasil Kepada Kab/Kota	1.177.659.225.703	1.334.273.509.903	1.764.024.522.670	1.920.559.281.430	2.063.821.141.426	15,46
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	410.060.814.931	190.749.814.931	436.986.098.841	657.845.799.066	552.584.087.998	27,54
	Belanja Tidak Terduga	746.176.380	-	-	4.497.452.726	98.759.600	-
2.2	BELANJA LANGSUNG	2.017.087.961.855	1.979.069.495.393	2.178.547.864.325	3.325.176.945.591	3.089.817.728.352	13,44
	Belanja Pegawai	148.070.030.980	181.862.098.337	144.776.980.151	156.935.312.600	134.390.258.250	(0,88)
	Belanja Barang dan Jasa	951.318.822.889	983.932.219.941	1.342.462.761.217	1.732.271.926.147	1.621.293.886.743	15,62
	Belanja Modal	917.699.107.986	813.275.177.115	691.308.122.957	1.435.969.706.844	1.334.133.583.359	18,56
	JUMLAH BELANJA DAERAH	5.317.735.488.617	5.295.139.151.997	6.192.155.567.940	8.084.140.158.994	8.925.813.442.214	14,37
3	PEMBIAYAAN DAERAH						
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	374.844.506.630	450.814.201.639	1.069.804.863.441	1.907.994.208.155	1.130.074.818.588	48,79
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	20.000.000.000	316.100.000.000	38.088.000.000	22.000.000.000	301.500.000.000	655,19
	JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH	354.844.506.630	134.714.201.639	1.031.716.863.441	1.885.994.208.155	828.574.818.588	157,64

3.1.2. Neraca Daerah

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Komponen Laporan Keuangan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuiatas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Khususnya Neraca yang tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam mengetahui Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi yang lebih efektif dan efisien.

Perkembangan Neraca Pemerintah Provinsi Banten per akhir periode Tahun 2013-2016 memberikan gambaran analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas, dan analisis rasio aktivitas.

1. Analisis Rasio Likuiditas

Menunjukkan kemampuan Pemerintah Provinsi Banten untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo pembayaran. Terdapat dua jenis rasio likuiditas yaitu yang pertama current ratio yaitu mengukur kemampuan membayar kewajiban jangka pendek dengan asset lancar yang dimiliki. Yang kedua quick ratio yaitu mengukur kemampuan membayar kewajiban jangka pendek dengan asset yang lebih liquid lagi (asset lancar – persediaan). Rasio likuiditas Pemerintah Provinsi Banten dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rasio Likuiditas Tahun 2013-2016 (dalam juta rupiah)

PERKIRAAN	2013	2014	2015	2016
Aset Lancar	1.260.677	2.110.192	1.481.642	638.256
Kewajiban Jangka Pendek	159.112	411.239	219.324	161.737
Persediaan	184.399	194.730	85.322	59.351
Aset Lancar – Persediaan	1.076.278	1.915.462	1.396.320	578.905
Current Ratio	792,3persen	513,1persen	675,5persen	394,6persen
Quick Ratio	676,4persen	465,8persen	636,6persen	357,9persen

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Berdasarkan tabel di atas rasio lancar menunjukkan bahwa setiap Rp 1 utang lancar pemerintah dijamin dengan asset sebesar Rp 792 pada tahun 2013, Rp 513 pada tahun 2014, Rp 676 pada tahun 2015, dan Rp 395 pada tahun 2016.

2. Analisis Rasio Solvabilitas

Rasio ini sering disebut juga dengan *leverage* Ratio yang membandingkan dana yang disediakan oleh entitas (Pemerintah Provinsi Banten) dengan dana yang dipinjam dari pihak ketiga. Rasio ini menggambarkan seberapa besar aktiva Pemerintah Provinsi Banten yang dibiayai dari hutang. Selain itu juga rasio ini dapat menunjukkan indikasi tingkat keamanan pihak ketiga dalam memberikan pinjaman. Dalam neraca Pemerintah Provinsi Banten Kewajiban kepada Pihak Ketiga bukanlah dalam bentuk pinjaman akan tetapi lebih disebabkan adanya pembayaran atas penyelesaian pekerjaan yang belum dibayarkan pada tahun berkenaan. Hal tersebut yang secara lazim disebut dengan pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga. Perbandingan Total Hutang terhadap ekuitas dan perbandingan Total Hutang terhadap Harta yang dirumuskan dengan :

1. *Total Debt to Equity Ratio* = (Total Hutang / Ekuitas) x 100persen
2. *Total Debt to Aktiva Ratio* = (Total Hutang / Harta) x 100persen

Dengan perhitungan sebagaimana tersaji pada table berikut :

Tabel 3.3
Rasio Solvabilitas Tahun 2013-2016 (dalam juta rupiah)

PERKIRAAN	2013	2014	2015	2016
Total Hutang	159.112	411.239	219.324	161.737
Total Ekuitas	10.562.084	12.124.101	9.917.022	9.873.242
Total Harta	10.721.196	12.535.341	10.136.346	10.034.979
<i>Debt to Equity Ratio</i>	1,5persen	3,4persen	2,2persen	1,6persen
<i>Debt to Aktiva Ratio</i>	1,5persen	3,3persen	2,2persen	1,6persen

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Atas Analisis Rasio Ekuitas di atas menggambarkan bahwa posisi keuangan Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun 2013-2016 yang dalam rangka pendanaan urusan pemerintahan setiap Rp 100 yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Banten terdapat dana pihak ketiga pada tahun 2013 sebesar Rp 1,5, tahun 2014 Rp 3,4, tahun 2015 Rp 2,2, dan Tahun 2016 Rp 1,6. Selanjutnya Rasio Hutang terhadap Ekuitas dan Rasio Hutang terhadap harta tidak terdapat

perbedaan yang signifikan karena memang jumlah hutang atau kewajiban kepada pihak ketiga sangat kecil.

Perkembangan Neraca Daerah Provinsi Banten Tahun 2013-2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Perkembangan Neraca Daerah Provinsi Banten Tahun 2013-2016

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	Rata -rata Pertumbuhan
1	ASET					
2	ASET LANCAR					
3	Kas di Kas Daerah	1.069.618.555.761	1.907.621.796.822	1.128.287.102.245	559.135.160.663	
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	191.026.370	1.587.994.005	6.819.711	15.476.461	
5	Kas di Bendahara Penerimaan	16.115.408	12.165.852	11.442.099	21.711.156	
6	Kas di BLUD		-	-		
6	Kas Lainnya		-	1.776.274.143	-	
8	Setara Kas		-	-		
9	Investasi Jangka Pendek		-	-		
7	Piutang Pajak	982.839.840	982.839.840	248.971.810.239	9.021.215	
8	Penyisihan Piutang Pajak	-	-	(1.245.008.442)	-	
9	Piutang Pajak Netto (7 - 8)	982.839.840	982.839.840	247.726.801.797	9.021.215	
10	Piutang Retribusi	11.515.608	6.996.500	2.722.793.100	3.950.037.382	
11	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-	(13.613.966)	-	
12	Piutang Retribusi Netto (10 - 11)	11.515.608	6.996.500	2.709.179.135	3.950.037.382	
13	Belanja Dibayar Dimuka		-	4.360.142.699	4.341.357.065	
14	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		-	-		
15	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		-	-		
16	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara Netto		-	-		
17	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		-	-		
18	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		-	-		
19	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Netto		-	-		
20	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat		-	-		
21	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat		-	-		
22	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat Netto		-	-		
23	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-		
24	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-		
25	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya Netto		-	-		
26	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		-	-		
27	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		-	-		
28	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto		-	-		
14	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		-	942.736.192	941.952.856	
15	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		-	(600.193.711)	609.400.125	
16	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto (14 - 15)		-	342.542.481	332.552.731	
17	Piutang Pendapatan		-	-		
18	Penyisihan Piutang Pendapatan		-	-		
19	Piutang Pendapatan Netto		-	-		
17	Piutang Lainnya	5.458.137.525	5.250.338.044	12.333.916.600	12.333.916.600	

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	Rata -rata Pertumbuhan
18	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	(1.233.391.660)	(1.233.391.660)	
19	Piutang Lainnya Netto (17 - 18)	5.458.137.525	5.250.338.044	11.100.524.940	11.100.524.940	
23	Beban Dibayar Dimuka		-	-	-	
20	Persediaan	184.399.050.570	194.730.387.793	85.322.131.994	59.351.033.759	(27,01)
21	JUMLAH ASET LANCAR (3+4+5+6+9+12+13+16+19+20)	1.260.677.241.082	2.110.192.518.856	1.481.642.961.243	638.256.875.372	(6,44)
22						
23	INVESTASI JANGKA PANJANG					
24	Investasi Nonpermanen	-		-	-	
25	Pinjaman Jangka Panjang		-	-	-	
26	Investasi dalam Surat Utang Negara		-	-	-	
27	Investasi dalam Proyek Pembangunan		-	-	-	
28	Investasi Non Permanen Lainnya		-	-	-	
25	Jumlah Investasi Nonpermanen (24)	-	-	-	-	
26	Investasi Permanen					
27	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	508.205.306.980	566.544.946.815	586.500.973.362	890.955.868.859	
32	Investasi Permanen Lainnya		-	-	-	
28	Jumlah Investasi Permanen (27)	508.205.306.980	566.544.946.815	586.500.973.362	890.955.868.859	
29	Jumlah Investasi Jangka Panjang (25 + 28)	508.205.306.980	566.544.946.815	586.500.973.362	890.955.868.859	22,30
30						
31	ASET TETAP					
32	Tanah	3.495.111.433.984	3.630.900.594.740	3.917.705.028.739	4.082.334.554.413	
33	Peralatan dan Mesin	878.631.052.313	1.103.481.099.962	1.327.660.883.093	1.598.125.431.320	
34	Gedung dan Bangunan	943.857.010.081	1.126.405.344.156	1.189.278.468.983	1.502.925.038.331	
35	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.286.585.672.965	3.360.338.352.211	3.603.050.777.270	5.118.919.796.299	
36	Aset Tetap Lainnya	14.449.307.369	17.176.068.564	30.552.898.128	49.536.201.770	
37	Konstruksi Dalam Pengerjaan	305.065.325.219	592.143.515.375	810.353.792.147	285.089.989.300	
38	Akumulasi Penyusutan		-	(2.897.435.523.551)	(4.226.107.057.015)	
39	JUMLAH ASET TETAP (32 s/d 38)	8.923.699.801.930	9.830.444.975.008	7.981.166.324.811	8.410.823.954.418	(1,09)
40						
41	DANA CADANGAN					
42	Dana Cadangan		-	-	-	
43	JUMLAH DANA CADANGAN (42)		-	-	-	
44						
45	ASET LAINNYA					
50	Tagihan Penjualan Angsuran		-	-	-	
51	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran		-	-	-	
52	Tagihan Penjualan Angsuran Netto		-	-	-	
53	Tagihan Jangka Panjang		-	-	-	
54	Penyisihan Tagihan Jangka Panjang		-	-	-	
55	Tagihan Jangka Panjang Netto		-	-	-	
46	Tuntutan Ganti Rugi danTuntutan Perbendaharaan	992.935.472	906.626.939	8.050.000	-	
47	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi danTuntutan Perbendaharaan	-	-	-	-	

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	Rata -rata Pertumbuhan
48	Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan Netto (46 - 47)	992.935.472	906.626.939	8.050.000	-	
53	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-		
49	Aset Tak Berwujud	13.731.477.929	15.881.180.062	20.425.685.129	16.124.276.720	
50	Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	(14.371.625.552)	(5.395.130.045)	
51	Aset Tak Berwujud Netto (49 - 50)	13.731.477.929	15.881.180.062	6.054.059.577	10.729.146.675	
52	Aset Lain-lain	13.890.158.584	11.371.328.150	80.974.477.022	84.214.121.507	
53	Jumlah Aset Lainnya (48 + 51 + 52)	28.614.571.985	28.159.135.151	87.036.586.599	94.943.268.182	72,19
54						
55	Jumlah Aset (21 + 29 + 39 + 43 + 53)	10.721.196.921.977	12.535.341.575.829	10.136.346.846.015	10.034.979.966.831	(1,07)
56						
57	KEWAJIBAN					
58						
59	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
60	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	4.863.050	76.883.508	6.819.610	15.476.461	
65	Utang Bunga		-	-		
66	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-	-		
67	Pendapatan Diterima Dimuka		-	-	186.364.932	
61	Utang Belanja	-	-	199.946.754.075	148.845.028.553	
69	Utang Beban		-	-		
62	Utang Jangka Pendek Lainnya	159.107.537.622	411.162.951.910	19.371.252.482	12.691.056.763	
68	Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan		-	-		#DIV/0!
63	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (60 s/d 62)	159.112.400.672	411.239.835.418	219.324.826.167	161.737.926.709	28,51
64						
65	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
70	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan		-	-		
70	Utang Dalam Negeri - Obligasi		-	-		
71	Premium (Diskonto) Obligasi		-	-		
71	Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-		
66	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-		
67	JUMLAH KEWAJIBAN (63 + 66)	159.112.400.672	411.239.835.418	219.324.826.167	161.737.926.709	28,51
68						
69	EKUITAS DANA					
70	EKUITAS DANA LANCAR					
71	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	1.069.804.863.441	1.907.994.208.155	-	-	
72	Pendapatan yang Ditangguhkan	16.115.408	1.150.993.016	-	-	
73	Cadangan Piutang	6.452.348.613	6.240.046.384	-	-	
74	Cadangan Persediaan	184.399.050.570	194.730.387.793	-	-	
75	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(159.107.537.622)	(411.162.951.910)	-	-	
76	Jumlah Ekuitas Dana Lancar (71 s/d 75)	1.101.564.840.410	1.698.952.683.438	-	-	
77						
78	EKUITAS DANA INVESTASI					
79	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	508.205.306.980	566.544.946.815	-	-	

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	Rata -rata Pertumbuhan
80	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	8.923.699.801.930	9.830.444.975.008	-	-	
81	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	28.614.571.985	28.159.135.151	-	-	
82	Jumlah Ekuitas Dana Investasi (79 s/d 81)	9.460.519.680.895	10.425.149.056.973	-	-	
83						
84	EKUITAS DANA CADANGAN					
85	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	-	-	-	
86	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan (85)	-	-	-	-	
87						
88	JUMLAH EKUITAS/EKUITAS DANA (76 + 82 + 86)	10.562.084.521.305	12.124.101.740.411		-	
89	JUMLAH EKUITAS	10.562.084.521.305	12.124.101.740.411	9.917.022.019.848	9.873.242.062.122	(1,29)
90	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (67 + 89)	10.721.196.921.977	12.535.341.575.829	10.136.346.846.015	10.034.979.988.831	(1,07)

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sekurang-kurangnya menjelaskan arah kebijakan umum daerah; pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah; penyelenggaraan urusan desentralisasi; penyelenggaraan tugas pembantuan; dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

3.2.1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Dalam rangka menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama yang berasal dari pos Pendapatan Asli Daerah, selama tahun 2012-2016 berbagai upaya telah dilakukan baik melalui kegiatan intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber pendapatan daerah. Sejalan dengan arah kebijakan penganggaran di bidang pendapatan, Pemerintah Provinsi Banten berupaya terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

melalui pajak daerah, non pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat dengan mempertimbangkan tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Banten selama tahun 2012-2016 telah melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mempertimbangkan perkembangan dunia usaha dan aspek keadilan masyarakat. Langkah-langkah yang ditempuh melalui:

1. Kegiatan-kegiatan Razia Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Pajak Daerah melalui media cetak dan media elektronik serta penyuluhan pajak daerah.
2. Koordinasi dengan instansi terkait antara lain Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Kepolisian Daerah Banten, Jasa Raharja, Bank bjb dan Bank Banten serta Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Produsen Kendaraan Bermotor (GAIKINDO) dan Lembaga Pembiayaan/*Leasing*.
3. Peningkatan koordinasi bidang retribusi daerah dengan Perangkat Daerah penghasil.
4. Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan Dana Perimbangan terutama Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.
5. Manajemen Kas Daerah dalam rangka peningkatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
6. Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan melalui penambahan penataan modal pada perusahaan daerah dan lembaga sektor perbankan.
7. Penyempurnaan sistem administrasi dan pelayanan perpajakan.
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik bidang pajak daerah melalui peningkatan kinerja aparatur pelayanan pajak daerah.
9. Penataan regulasi dibidang perpajakan dan retribusi daerah.
10. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan melalui: rehabilitasi/renovasi bangunan gedung unit pelayanan teknis dinas yang representatif, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung.
11. Peningkatan sumberdaya manusia melalui bimbingan teknis peningkatan kemampuan pelayanan aparatur, pelatihan penerapan sistem aplikasi samsat (sistem administrasi manunggal satu atap) dan pembinaan aparatur pelayanan di unit pelayanan teknis dinas.

12. Peningkatan pelayanan pada Unit Pelayanan Teknis Dinas/Kantor Bersama Samsat melalui kegiatan:
- a. Samsat Keliling dengan jumlah armada bis samsat keliling sebanyak 6 unit.
 - b. Pembentukan Gerai Samsat sampai dengan tahun 2016, sudah terdapat 26 Gerai Samsat yang tersebar di 8 (delapan) Kabupaten/Kota.
 - c. Pembentukan Samsat Drive *Thru* di Kantor Bank Jabar Banten Serang.
 - d. Pembentukan Gerai Samsat *Online* bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di 2 lokasi yakni Kantor Bersama Samsat Cinere dan Kantor Bersama Samsat Jakarta Selatan serta dengan Polda Banten.
 - e. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Kantor Bersama Samsat Cikokol, Serpong, Ciputat, Ciledug, Serang, Cilegon, Balaraja.
13. Peningkatan maintenance Sistem Aplikasi Samsat.
14. Peningkatan pendapatan pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui Program Bulan Bakti/Panutan dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Banten tentang penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor atas keterlambatan daftar atau bayar dan penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) atas penyerahan kedua dan selanjutnya bagi kendaraan bermotor yang berasal dari luar Provinsi Banten yang dilakukan setiap tahun pada periode bulan Agustus s.d November.

3.2.2. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Selama tahun 2012-2016, Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan belanja daerah. Upaya tersebut melalui:

1. Peningkatan sistem penganggaran daerah melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPADA),
2. Peningkatan sistem pengelolaan perbendaharaan daerah melalui Sistem Perbendaharaan Daerah (SIMPEDA),

3. Peningkatan sistem pelaporan keuangan daerah melalui Sistem Akuntansi Keuangan (SIKU),
4. Peningkatan sistem manajemen barang daerah (SIMDA),
5. Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan,
6. Peningkatan sarana dan prasarana administrasi pengelolaan keuangan,
7. Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan,
8. Monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan

3.2.3. Proporsi Penggunaan Anggaran

Gambaran realisasi dari kebijakan belanja daerah Provinsi Banten pada periode tahun anggaran sebelumnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah, adalah sebagai berikut:

1. Persentase Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Tabel 3.5
Persentase Belanja Daerah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2016

NO	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	RERATA
2	BELANJA DAERAH						
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	95	93	92	96	98,68	94.94
	Belanja Pegawai	96	89	85	96	97,72	92.74
	Belanja Bunga	-		-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-		-	-	-	-
	Belanja Hibah	94	91	90	97	98,40	94.08
	Belanja Bantuan Sosial	98	42	95	96	90,38	84.28
	Belanja Bagi Hasil Kepada Kab/Kota	98	99	94	94	100	97.00
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	88	98	99	100	98,32	96.66
	Belanja Tidak Terduga	12	0	0	14	57,04	16.61
	Belanja Bantuan PILKADA	-	-	-	-	-	-
2.2	BELANJA LANGSUNG	92	70	62	77	91,16	78.43
	Belanja Pegawai	96	90	85	88	92,89	90.38
	Belanja Barang dan Jasa	96	88	83	79	92,21	87.64
	Belanja Modal	89	53	40	74	89,74	69.15
	JUMLAH BELANJA DAERAH	94	83	79	87	95,94	87.79

Sumber : SIPD Provinsi Banten

2. Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur

Tabel 3.6
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Daerah
Provinsi Banten (dalam juta) Tahun 2012-2016

Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja Daerah + Pengeluaran Pembiayaan)	Persentase
a	b	c	d = (b / c) x100
TA 2012	533.051.252.068	5.337.735.488.617	9,99
TA 2013	605.003.141.906	5.611.239.151.997	10,78
TA 2014	626.105.421.399	6.230.243.567.940	10,05
TA 2015	701.572.721.665	8.106.140.158.994	8,65
TA 2016	728.800.923.266	9.227.313.442.214	7,90

Sumber : SIPD Provinsi Banten

3.2.4. Analisis Pembiayaan

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan sumbernya, pembiayaan dibagi menjadi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang di antaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Sedangkan ketika APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah,

pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan.

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Defisit riil anggaran secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Defisit Riil Anggaran
Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2016

NO	URAIAN	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH	5.413.705.183.626	6.230.229.813.799	7.068.432.912.654	7.328.220.769.427	8.656.395.495.445
1.1	Pendapatan Asli Daerah	3.395.883.043.919	4.118.551.716.459	4.899.125.741.756	4.972.737.619.281	5.463.156.734.851
1.2	Dana Perimbangan	1.015.105.167.897	1.126.004.171.838	1.159.872.633.122	976.787.585.900	3.185.553.940.739
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.002.716.971.810	985.673.925.502	1.009.434.537.776	1.378.817.456.419	7.684.819.855
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	5.413.705.183.626	6.230.229.813.799	7.068.432.912.654	7.328.220.769.427	8.656.395.495.445
2	BELANJA DAERAH	5.317.735.488.617	5.295.139.151.997	6.192.155.567.940	8.084.140.158.994	8.925.813.442.214
2.1	Belanja Tidak Langsung	3.300.647.526.762	3.316.069.656.604	4.013.607.703.615	4.758.963.213.403	5.835.995.713.862
2.2	Belanja Langsung	2.017.087.961.855	1.979.069.495.393	2.178.547.864.325	3.325.176.945.591	3.089.817.728.352
	JUMLAH BELANJA DAERAH	5.317.735.488.617	5.295.139.151.997	6.192.155.567.940	8.084.140.158.994	8.925.813.442.214
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	20.000.000.000	316.100.000.000	38.088.000.000	22.000.000.000	301.500.000.000
	Defisit Riil	75.969.695.009	618.990.661.802	838.189.344.714	(777.919.389.567)	(570.917.946.769)

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 3.8
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2016

NO	URAIAN	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Than Anggaran Sebelumnya	374.844.506.630	450.814.201.639	1.069.804.863.441	1.907.994.208.155	1.130.074.818.588
	Persentase dari Surplus / (Defisit Riil)	493,4	72,8	127,6	245,3	197,9
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Dari tabel terlihat bahwa dari kurun waktu tahun 2012 s.d 2016 terdapat kecenderungan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang relatif tinggi. Pada tahun 2016 SiLPA berada pada angka yang relative rendah.

Surplus/Defisit Riil adalah realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Surplus/Defisit riil APBD Provinsi Banten selama kurun waktu tahun 2012 s.d 2016 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.9
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2012-2016

NO	URAIAN	2012		2013		2014		2015		2016	
		Rp	persen dari SiLPA	Rp	persen dari SiLPA	Rp	persen dari SiLPA	Rp	persen dari SiLPA	Rp	persen dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	374.844.506.630	100,0	450.814.201.639	100,0	1.069.804.863.441	100,0	1.907.994.208.15 ₅	100,0	1.130.074.818.5 ₈₈	100,0
2	Pelampauan Penerimaan PAD	158.012.701.863	42,2	137.202.861.459	30,4	236.710.353.810	22,1	(97.047.849.936)	(5,1)	133.080.888.53 ₇	11,8
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	(2.775.832.103)	(0,7)	(108.975.760.162)	(24,2)	(7.872.318.878)	(0,7)	(205.381.332.100)	(10,8)	46.079.215.714	4,1
4	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	(49.401.718.190)	(13,2)	(70.171.314.498)	(15,6)	(1.392.024.278)	(0,1)	(11.423.332.574)	(0,6)	2.284.819.855	0,2
5	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	344.979.050.069	92,0	1.111.749.076.642	246,6	1.680.548.197.501	157,1	1.443.927.333.19 ₈	75,7	377.711.947.71 ₃	33,4
6	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan	92.031.033.129	24,6	159.112.400.672	35,3	411.239.835.418	38,4	219.324.826.167	11,5	161.737.926.70 ₉	14,3
7	Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi APBD Provinsi Banten mengalami surplus pada tahun 2012, 2013 dan 2014. dan hanya mengalami defisit pada tahun 2015 dan tahun 2016. Hal ini berakibat semakin besarnya SILPA yang bisa digunakan menjadi sumber pembiayaan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Berdasarkan kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu sampai tahun 2016, digambarkan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah dari tahun 2017 hingga tahun 2022 mendatang yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi pendapatan daerah menggunakan potensi dana rata-rata pertumbuhan realisasi masing-masing objek pendapatan daerah dalam kurun waktu 2017-2022, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.10.

1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah

Kelompok Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Berdasarkan data realisasi pada tahun-tahun sebelumnya, komposisi pendapatan didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah yang pada tahun 2016 mencapai 63 persen dari Pendapatan Daerah. Pencapaian Target Daerah dapat dilakukan intervensi secara langsung melalui program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten

yaitu yang terkait dengan pajak daerah khususnya yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan. Sedangkan Pajak Rokok realisasinya bergantung pada hasil pajak rokok yang dihimpun oleh Pemerintah Pusat.

Pada RPJMD Tahun 2017-2022, pertumbuhan rata-rata pendapatan asli daerah diproyeksi meningkat sebesar 7,8 persen. Penetapan target peningkatan pendapatan asli daerah ini didasarkan pada realisasi periode sebelumnya serta pertimbangan logis yang mendasari penetapan target pendapatan asli daerah, antara lain regulasi yang berlaku, daya beli masyarakat, titik jenuh angka pertumbuhan kendaraan bermotor, perubahan pola pembelian kendaraan bermotor baru yang bergeser ke LCGC (*Low Cost Green Car*).

Selanjutnya pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi daerah diproyeksikan meningkat 0,67-3,2 persen, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan diproyeksikan meningkat 4,8 – 5,7 persen setiap tahunnya. Selanjutnya lain-lain PAD yang sah diproyeksikan tidak meningkat hal ini terkait dengan target perpajakan dimana pos tersebut berasal dan denda keterlambatan pajak, tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan yang diharapkan menurun setiap tahunnya.

b. Dana Perimbangan

Kelompok Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana bagi hasil pajak/bukan pajak merupakan bagian dana transfer dari Pemerintah Pusat yang realisasinya bergantung hasil penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan bukan pajak yang formulasinya telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selaras dengan adanya asumsi pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Provinsi Banten menargetkan kenaikan pendapatan dana bagi hasil pajak/bukan yang meningkat antar 5,2- 5,4 persen setiap tahunnya.

Dana Alokasi Umum diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar 4,4 persen setiap tahunnya. Hal tersebut didasarkan atas asumsi peruntukkan dana alokasi umum untuk pembayaran belanja pegawai

selanjutnya diprediksi setiap tahunnya untuk mendanai gaji PNSD. Adapun hal yang menguatkan adanya kenaikan Dana Alokasi Umum asumsi membaiknya penerimaan negara selaras dengan target pertumbuhan ekonomi.

Dana Alokasi Khusus diproyeksikan tetap sebesar Rp 2,37 triliun yang peruntukkannya berupa DAK Non Fisik untuk pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang bersumber dari pendapatan hibah diproyeksikan meningkat dengan rata rata 11,47 persen pada tahun.

2. Belanja Daerah

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

diproyeksikan meningkat sebesar 9,5 persen setiap tahunnya. Hal tersebut didasarkan atas asumsi peruntukkan dana alokasi umum untuk pembayaran belanja pegawai selanjutnya diprediksi setiap tahunnya akan ada kenaikan gaji PNSD sebesar 7 persen dan *acress* sebesar 2,5 persen. Adapun hal yang menguatkan adanya kenaikan gaji PNSD dalam kerangka upaya pemerintah untuk tetap mempertahankan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil ditengah laju inflasi yang terus terjadi setiap tahunnya.

2) Belanja Hibah

Belanja hibah diproyeksikan sebesar 2,14 triliun setiap tahunnya. Peruntukkan hibah ditujukan bagi pendanaan biaya operasional sekolah Pendidikan menengah dan sekolah khusus. Selanjutnya terdapat peningkatan belanja hibah pada tahun 2022 sebagai langkah persiapan untuk pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah pada tahun 2022.

3) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial pada setiap tahunnya dianggarkan sebesar 138,8 miliar.

4) Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota

Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kenaikan belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota diproyeksikan meningkat pada angka 6 persen yang tentunya hal tersebut telah seiring dengan upaya pencapaian target pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah. Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan apabila penganggaran untuk melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar sudah terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Partai Politik, dan Pemerintahan Desa.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Partai Politik, dan Pemerintahan Desa dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian sasaran pembangunan Provinsi Banten tahun 2017-2022.

6) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dianggarkan pada kisaran 5 persen dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung ditujukan mendanai pelaksanaan program – program pembangunan Provinsi Banten dalam rangka pencapaian visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang berujung pada kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten. Pelaksanaan Program pembangunan tentunya telah mempedomani kewenangan tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pertumbuhan rata rata belanja langsung sebesar 3,15 persen setiap tahunnya.

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang merupakan hasil pelampauan target pendapatan dan efisiensi

b. Pengeluaran Pembiayaan

Rencana pengeluaran pembiayaan daerah akan diatur sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan.

Proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Provinsi Banten tahun 2017-2022 disajikan pada tabel 3.10 :

Tabel 3.10
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten
Periode RPJMD 2017 - 2022

KODE	URAIAN	RATA - RATA PERTUMBUHAN (%)	PROYEKSI ANGGARAN PER TAHUN					TOTAL (Rp)
			2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	
4	PENDAPATAN							
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7,84	6.055.132.653.548	6.528.642.554.689	7.040.038.930.313	7.592.156.629.068	8.188.398.945.859	35.404.369.713.477
411	Pendapatan Pajak Daerah	8,00	5.879.706.840.000	6.350.083.387.200	6.858.090.058.176	7.406.737.262.829	7.999.276.243.857	34.493.893.792.062
412	Hasil Retribusi Daerah	2,04	20.177.648.520	20.311.002.461	20.700.707.109	21.171.201.211	21.874.536.974	104.235.096.275
413	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,30	52.300.000.000	55.300.000.000	58.300.000.000	61.300.000.000	64.300.000.000	291.500.000.000
414	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	102.948.165.028	102.948.165.028	102.948.165.028	102.948.165.028	102.948.165.028	514.740.825.140
42	DANA PERIMBANGAN	2,13	4.150.377.356.801	4.237.525.962.034	4.327.179.729.284	4.419.543.302.811	4.514.840.097.789	21.649.466.448.719
421	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	5,35	666.976.042.950	701.658.797.183	738.846.713.433	778.744.435.960	821.575.379.938	3.707.801.369.464
422	Dana Alokasi Umum	4,44	1.105.873.941.851	1.158.339.792.851	1.210.805.643.851	1.263.271.494.851	1.315.737.345.851	6.054.028.219.255
423	Dana Alokasi Khusus	-	2.377.527.372.000	2.377.527.372.000	2.377.527.372.000	2.377.527.372.000	2.377.527.372.000	11.887.636.860.000
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11,47	6.000.000.000	7.750.000.000	8.076.000.000	8.596.000.000	9.116.000.000	39.538.000.000
431	Pendapatan Hibah	4,39	6.000.000.000	6.500.000.000	6.576.000.000	6.846.000.000	7.116.000.000	33.038.000.000
432	Dana Darurat		-	-	-	-	-	-
433	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-	-	-
434	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		-	-	-	-	-	-
435	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-	-	-
436	Pendapatan Lainnya		-	1.250.000.000	1.500.000.000	1.750.000.000	2.000.000.000	6.500.000.000
	JUMLAH PENDAPATAN	5,63	10.211.510.010.349	10.773.918.516.723	11.375.294.659.597	12.020.295.931.879	12.712.355.043.648	57.093.374.162.196
								-

KODE	URAIAN	RATA - RATA PERTUMBUHAN (%)	PROYEKSI ANGGARAN PER TAHUN					TOTAL (Rp)
			2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	
5	BELANJA DAERAH							-
51	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,68	6.906.484.334.369	7.235.179.112.634	7.560.603.712.334	8.044.437.279.506	8.289.550.027.059	38.036.254.465.902
511	Belanja Pegawai	9,50	1.816.645.034.369	1.989.226.312.634	2.178.202.812.334	2.385.132.079.506	2.611.719.627.059	10.980.925.865.902
512	Belanja Bunga		-	-	-	-	-	-
513	Belanja Subsidi		-	-	-	-	-	-
514	Belanja Hibah	0,15	2.141.508.700.000	2.141.508.700.000	2.141.508.700.000	2.311.508.700.000	2.141.508.700.000	10.877.543.500.000
515	Belanja Bantuan Sosial	-	138.877.500.000	138.877.500.000	138.877.500.000	138.877.500.000	138.877.500.000	694.387.500.000
516	Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	6,53	2.340.606.300.000	2.493.719.800.000	2.656.667.900.000	2.830.072.200.000	3.014.597.400.000	13.335.663.600.000
517	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa dan Partai Politik	(6,37)	413.846.800.000	413.846.800.000	383.846.800.000	313.846.800.000	313.846.800.000	1.839.234.000.000
518	Belanja Tidak Terduga	5,83	55.000.000.000	58.000.000.000	61.500.000.000	65.000.000.000	69.000.000.000	308.500.000.000
								-
52	BELANJA LANGSUNG	3,15	4.000.000.000.000	4.143.119.400.000	4.250.543.000.000	4.241.910.000.000	4.523.657.300.000	21.159.229.700.000
521	Belanja Pegawai	3,15	280.000.000.000	290.018.358.000	297.538.010.000	296.933.700.000	316.656.011.000	1.481.146.079.000
522	Belanja Barang dan Jasa	3,15	1.640.000.000.000	1.698.678.954.000	1.742.722.630.000	1.739.183.100.000	1.854.699.493.000	8.675.284.177.000
523	Belanja Modal	3,15	2.080.000.000.000	2.154.422.088.000	2.210.282.360.000	2.205.793.200.000	2.352.301.796.000	11.002.799.444.000
	TOTAL BELANJA DAERAH	4,11	10.906.484.334.369	11.378.298.512.634	11.811.146.712.334	12.286.347.279.506	12.813.207.327.059	59.195.484.165.902
	TOTAL SURLPLUS / DEFISIT	(35,49)	(694.974.324.020)	(604.379.995.911)	(435.852.052.737)	(266.051.347.627)	(100.852.283.411)	(2.102.110.003.706)
								-
6	PEMBIAYAAN DAERAH							
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH		694.974.324.020	604.379.995.911	435.852.052.737	266.051.347.627	100.852.283.411	2.102.110.003.706
611	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya		694.974.324.020	604.379.995.911	435.852.052.737	266.051.347.627	100.852.283.411	2.102.110.003.706
612	Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	-	-	-
613	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		-	-	-	-	-	-
614	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-	-	-	-	-
615	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman		-	-	-	-	-	-
616	Penerimaan Piutang Daerah		-	-	-	-	-	-

KODE	URAIAN	RATA - RATA PERTUMBUHAN (%)	PROYEKSI ANGGARAN PER TAHUN					TOTAL (Rp)
			2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	
617	Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah		-	-	-	-	-	-
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH		-	-	-	-	-	-
621	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	-	-	-	-
622	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		-	-	-	-	-	-
623	Pembayaran Pokok Utang		-	-	-	-	-	-
624	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	-	-	-
	TOTAL PEMBIAYAAN NETTO		694.974.324.020	604.379.995.911	435.852.052.737	266.051.347.627	100.852.283.411	2.102.110.003.706
	TOTAL SILPA		-	-	-	-	-	-

Sumber : Hasil Pengolahan Data Tim RPJMD Provinsi Banten

3.3.2. Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran dikelompokkan 3 (tiga) prioritas, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Prioritas I**, merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (duapuluh persen).

Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. **Prioritas II**, Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

3. **Prioritas III**, Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan sebagaimana tabel 3.11.

Tabel 3.11
Kapasitas Riil Kemampuan Kapasitas Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah

NO	URAIAN	TAHUN 2018 (Rp)	TAHUN 2019 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)	TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2022 (Rp)
1	Pendapatan	10.211.510.010.349	10.773.918.516.723	11.375.294.659.597	12.020.295.931.879	12.712.355.043.648
2	Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	694.974.324.020	604.379.995.911	435.852.052.737	266.051.347.627	100.852.283.411
	Total Penerimaan	10.906.484.334.369	11.378.298.512.634	11.811.146.712.334	12.286.347.279.506	12.813.207.327.059
	Dikurangi :					
4	Belanja Tidak Langsung	6.906.484.334.369	7.235.179.112.634	7.560.603.712.334	8.044.437.279.506	8.289.550.027.059
5	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	4.000.000.000.000	4.143.119.400.000	4.250.543.000.000	4.241.910.000.000	4.523.657.300.000

Sumber : Hasil Pengolahan Data Tim RPJMD Provinsi Banten

Kapasitas riil kemampuan kapasitas daerah untuk mendanai pembangunan daerah merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan daerah, pencairan dana cadangan dan sisa lebih perhitungan anggaran dikurangi belanja wajib mengikat (Belanja Tidak Langsung) dan Pengeluaran Pembiayaan. Dalam hal kemampuan keuangan daerah tidak mencukupi untuk mendanai program/kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan melalui skema pendanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU).

Tabel 3.12
Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Banten

NO	URAIAN	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
1	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	4.000.000.000.000	4.143.119.400.000	4.250.543.000.000	4.241.910.000.000	4.523.657.300.000
2	Prioritas I					
	- Belanja Pegawai pada BTL	1.816.645.034.369	1.989.226.312.634	2.178.202.812.334	2.385.132.079.506	2.611.719.627.059
	- Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota	2.340.606.300.000	2.493.719.800.000	2.656.667.900.000	2.830.072.200.000	3.014.597.400.000
3	Prioritas II					
	- Belanja Program/Kegiatan	4.000.000.000.000	4.143.119.400.000	4.250.543.000.000	4.241.910.000.000	4.523.657.300.000
4	Prioritas III					
	- Belanja Hibah	2.141.508.700.000	2.141.508.700.000	2.141.508.700.000	2.311.508.700.000	2.141.508.700.000
	- Belanja Bantuan Sosial	138.877.500.000	138.877.500.000	138.877.500.000	138.877.500.000	138.877.500.000
	- Belanja Bantuan Keuangan	413.846.800.000	413.846.800.000	383.846.800.000	313.846.800.000	313.846.800.000
	- Belanja Tidak Terduga	55.000.000.000	58.000.000.000	61.500.000.000	65.000.000.000	69.000.000.000

Sumber : Hasil Pengolahan Data Tim RPJMD Provinsi Banten